

POTENSI PERKEMBANGAN WILAYAH DAN KAITANNYA DENGAN TATA RUANG DI KAWASAN LERENG MERAPI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

oleh

Luthfi Muta'ali

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan perkembangan wilayah kawasan lereng Merapi yang dikaitkan dengan peruntukan fungsi tata ruang. Lingkup wilayah dan unit analisis adalah seluruh desa di kawasan pengembangan Lereng Merapi, yaitu sejumlah 206 desa yang tersebar di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder. Potensi perkembangan wilayah diidentifikasi dengan indikator demografis, karakteristik sosial ekonomi, penggunaan lahan dan infrastruktur, dan aksesibilitas. Sedangkan data peruntukan ruang dikelompokkan dalam peruntukan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Teknik analisis yang digunakan antara lain statistik deskriptif, penentuan tipologi wilayah, analisis deskriminan, shift analysis, dan pemetaan.

Hasil penelitian menunjukkan, pola perkembangan wilayah di kawasan lereng Merapi terkonsentrasi di bagian tengah (kota Yogyakarta dan pinggirannya) dan menuju kearah lereng atas (Kabupaten Sleman). Pada fungsi budidaya, sebagian besar wilayah bertipe I (besar tumbuh) berada di daerah perkotaan dan perluasannya, sedangkan wilayah tipe II (kecil tumbuh) umumnya berfungsi sebagai daerah pertanian lahan basah. Pada peruntukan fungsi lindung, khususnya lindung bawahan (resapan air), terdapat 36,7% (18 desa) yang berpotensi berkembang pesat. Analisis basis ekonomi juga menunjukkan bahwa potensi perkembangan wilayah tinggi, akan diiringi oleh pergeseran menguatnya peran sektor non pertanian. Tipologi wilayah menurut fungsi kawasan dapat digunakan sebagai dasar dalam determinasi perkembangan wilayah, karena memiliki tingkat perbedaan yang signifikan antara fungsi lindung dan budidaya.

Gejala potensi perkembangan wilayah yang tinggi di lereng bagian tengah dan atas yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan resapan tidak menguntungkan dari sisi ekologis, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan untuk menggeser arah perkembangan kawasan lereng Merapi ke arah barat dan selatan, dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru. Selain itu perlu kontrol dan pengendalian peruntukan fungsi tata ruang secara ketat terutama pada wilayah tipe I dan II. Sedangkan untuk mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi rendah (tipe IV), diperlukan redistribusi hasil-hasil pembangunan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Kawasan Lereng Merapi memiliki fungsi dan karakteristik ekologis tertentu yang membutuhkan persyaratan pengelolaan khusus agar tidak merugikan (Sutikno, 1995). Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk beserta kebutuhannya telah memberikan tekanan terhadap penurunan fungsi dan kualitas kawasan lereng Merapi, khususnya sebagai kawasan resapan air. Penurunan kualitas dan fungsi kawasan ini merupakan gangguan terhadap sistem wilayah secara keseluruhan.

Penetapan kawasan lereng Merapi¹ sebagai wilayah penyangga resapan air Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk melindungi sumberdaya air daerah di bawahnya yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, menahan perkembangan perkotaan ke arah atas (utara) dan mengefektifkan pemindahan fungsi kota Yogyakarta ke kota-kota kecil kecamatan ke arah barat-timur (Dwiatmo, 1991). Selain itu kawasan lereng Merapi, khususnya dibagian bawah (kaki) juga memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian wilayah, yaitu sebagai kawasan andalan dan pengembangan perkotaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di Propinsi DIY cenderung terkonsentrasi di Kawasan Lereng Merapi, bahkan pada akhir-akhir ini terdapat kecenderungan menuju arah utara (lereng atas Merapi), khususnya pada koridor jalan Yogyakarta-Magelang dan Yogyakarta-Kaliurang (Muta'ali, 2000a). Kegiatan pembangunan perumahan dan aktivitas sosial ekonomi yang semakin meningkat intensitasnya di wilayah ini diduga akan memicu alih fungsi ruang yang tidak terkendali dan 'mengancam' keberadaan dan fungsi lindung (Sugandi, 1992).

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah yang terkonsentrasi di lereng Merapi, khususnya ke arah utara memberikan tekanan terhadap kondisi sistem tata air dan fungsi lindung. Hal ini disebabkan kawasan lereng Merapi merupakan *recharge aquifer* yang menjaga kestabilan *supply* air untuk kota Yogyakarta (McDonald and Partner, 1984). Di samping penurunan air tanah, perkembangan fisik yang terlalu cepat juga memberikan imbas terhadap degradasi lahan dan meningkatnya banjir di daerah bawah (hilir) (Sutikno, 1995), khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Dengan demikian terganggunya fungsi kawasan lereng Merapi akan mengganggu *sustainability* kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Potensi ancaman lain berasal dari peningkatan kebutuhan penduduk terhadap lahan pada daerah setempat yang diperkirakan juga akan melakukan konversi lahan hutan dan kebun (pekarangan) menjadi sawah, tegal dan pemukiman yang secara langsung juga menurunkan fungsi lindung dan memperluas lahan kritis (Mantra, 1991). Selama lima tahun terakhir, berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 1993 di daerah penelitian telah terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun sebanyak 400 ha (Anonim, 1993). Selain

¹ Batasan Kawasan Lereng Merapi dalam penelitian ini mengacu pada ...

itu, konflik kepentingan antar bentuk penggunaan lahan dan ketidakselarasan pemanfaatan ruang yang cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penurunan fungsi wilayah, perlu segera diantisipasi (Sugandhy, 1994; Djajadiningrat, 1995).

Dari aspek ekonomi, perkembangan wilayah yang terkonsentrasi di kawasan lereng Merapi juga tidak menguntungkan bagi kondisi ekologi setempat, karena dapat menghambat perkembangan wilayah yang lain dan meningkatkan kesenjangan antar wilayah, yang akan memberikan pengaruh tidak baik bagi kelangsungan pembangunan, oleh karena itu dituntut suatu upaya penanganan segera yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Dengan demikian guna meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan lereng Merapi secara optimal, maka perlu dikaji terlebih dahulu sampai sejauh mana potensi perkembangan wilayah, sehingga dapat diperoleh arahan kebijaksanaan dan pengembangan yang tepat dan optimal. Oleh karena itu digunakan analisis potensi perkembangan dan tata ruang (peruntukan fungsi kawasan) sebagai dasar pengelolaan kawasan lereng Merapi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Tinjauan Pustaka

Tingkat perkembangan suatu wilayah pada dasarnya merupakan fungsi dari lingkungan alam, penduduk dan kegiatan ekonomi dan sosial. Interaksi antara lingkungan alam, penduduk dan kegiatan ekonomi dan sosial pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah (Budihardjo, 1995).

Salah satu bentuk perkembangan wilayah adalah pertumbuhan kawasan perkotaan dan *level urbanization* (Muta'ali, 2000b). Badan Pusat Statistik merumuskan wilayah sebagai daerah termasuk perkotaan, dengan indikator : (1) kepadatan penduduk 5000 orang atau lebih per kilometer persegi, (2) jumlah rumah tangga pertanian 25% atau lebih kecil, (3) memiliki delapan atau lebih fasilitas perkotaan².

Sujarto (1988) mengungkapkan perkembangan wilayah perkotaan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya (1) peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk; (2) kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pembangunan; dan (3) perkembangan sosial, ekonomi dan politik terhadap suatu kepentingan fungsi kota.

Dari sisi yang lain dikatakan bahwa tingkat perkembangan wilayah merupakan wujud dan hasil pembangunan (Tjokroamidjojo, 1983). Oleh karena itu untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat diukur dengan tingkat pencapaian tujuan pembangunan, seperti mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. (Todaro, 1983).

² Jenis fasilitas untuk menentukan kriteria perkotaan dalam Sensus Penduduk 1980 dan 1990 adalah (1) Sekolah Dasar sederajat, (2) Sekolah Menengah Pertama dan sederajat. (3) Sekolah Menengah Atas dan sederajat. (4) bioskop. (5) rumah sakit. (6) rumah bersalin, (7) puskesmas / klinik, (8) jalan dapat dilalui kendaraan roda empat. (9) telepon/kantor pos, (10) pasar bangunan permanen. (11) pasar tradisional. (12) bank. (13) pabrik. (14) restoran. (15) listrik. (16) persewaan alat

Terkait dengan pengertian di atas dan kaitannya dengan fungsi ekologis kawasan lereng Merapi, maka dalam penelitian ini, perkembangan wilayah lebih didefinisikan sebagai meningkatnya derajat kekotaan. Oleh karena itu variabel yang digunakan juga memiliki kesamaan dengan tingkat urbanisasi.

Dalam kajian ekonomi regional, perkembangan dan pertumbuhan wilayah dapat dilakukan dengan mengembangkan basis ekonomi (Houwer, E.M dalam Richardson 1991), mengembangkan suatu model ekonomi regional yaitu basis ekonomi atau *economic base*, model ini dapat menjelaskan struktur perekonomian daerah dengan membagi kegiatan ekonomi wilayah atas dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Menurut Tiebout (dalam Bendavid, 1983) model basis ekonomi mengasumsikan bahwa kegiatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh sektor basis yang akan mempengaruhi kegiatan non basis. Besarnya pengaruh kegiatan basis terhadap sektor non basis dapat diketahui dari besarnya angka pengganda atau *economic base multiplier*. Selanjutnya, untuk menggolongkan aktivitas ekonomi yang meliputi sektor ke dalam aktivitas basis dan aktivitas non basis dapat digunakan pendekatan *location quotient method*, yang pada dasarnya menggunakan teknik perbandingan antara pola aktivitas di suatu daerah dengan seluruh daerah (Warpani, 1997). Sedangkan untuk analisa pengganda pendapatan jangka pendek dan analisa pengganda pendapatan jangka panjang dapat digunakan model Tiebout (dalam Bendavid, 1983).

Permasalahan yang sering tidak terhindarkan dalam pengembangan wilayah adalah terjadinya konflik penggunaan ruang dan sumberdaya alam (Soemarwoto, 1992). Pemanfaatan sumberdaya alam dan ruang yang tidak terkendali sebagai akibat meningkatnya perkembangan wilayah³ dapat menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan dan daya dukungnya. Sejalan dengan proses perkembangan wilayah, terjadi peningkatan tingkat impermeabilitas tanah, degradasi lahan (erosi, sedimentasi), limpasan air permukaan (*runoff*), banjir, dan kelangkaan sumberdaya air semakin meningkat (Sudarmadji, 1996). Salah satu wilayah yang tengah mengalami degradasi fungsi adalah kawasan lindung dan resapan air di Propinsi DIY.

Sutikno (1995) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan di Kota Yogyakarta telah memberikan imbas terhadap degradasi lahan. Hal ini disebabkan oleh pembangunan areal pemukiman, meningkatnya limpasan permukaan, tersumbatnya saluran drainase, dan banjir. Semakin padat pemukiman semakin besar tingkat degradasi lahan. Menurut McDonald and Partner (1984), peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan fisik kota Yogyakarta ke arah lereng Merapi memberikan tekanan terhadap kondisi sistem tata air, khususnya air tanah. Hal ini disebabkan kawasan lereng Merapi merupakan *recharge aquifer* yang bertujuan menjaga kestabilan *supply* air untuk kota Yogyakarta. Dengan demikian terganggunya fungsi lereng Merapi akan mengganggu keberlanjutan atau *sustainability* perkembangan kota Yogyakarta dan sekitarnya.

³ Tingkat perkembangan suatu wilayah merupakan fungsi dari lingkungan alam, penduduk dan

Douglass, M (1991), menyebutkan bahwa proses pengkotaan dan perkembangan wilayah di kawasan Asia Pasifik telah memberi dampak pada degradasi lingkungan, baik yang bersifat lokal maupun regional. Pada akhirnya pertumbuhan wilayah perkotaan ini memberikan tekanan besar atas lingkungan pedesaan yang dalam banyak kasus tumbuh melampaui batas daya dukung wilayah. Bank Dunia (dalam Douglass, M 1991) melaporkan bahwa kelangkaan sumberdaya air menjadi ancaman lingkungan nomor satu di kota-kota Asia, termasuk Indonesia. Masalah lain adalah berkurangnya wilayah resapan air, berkurangnya air tanah dalam dan dangkal, kekeringan, masalah banjir dan meningkatnya kekerasan muka tanah.

Untuk menyerasikan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kebutuhan manusia, perlu diupayakan penatagunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penatagunaan ruang (Budihardjo, 1995). Melalui rencana tata ruang wilayah ini dapat dihindari pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya (Sugandhy, 1994). Sebagai langkah antisipatif dari menurunnya fungsi ekologis kawasan lereng Merapi, maka perlu adanya studi atau kajian yang berfokus pada analisis potensi perkembangan. Dari aspek perencanaan studi ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat prioritas pengembangan dan penanganan masalah.

Tujuan

Melihat berbagai kenyataan dan harapan yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, studi ini bermaksud untuk mengadakan kajian terhadap potensi dan perkembangan wilayah di kawasan lereng Merapi Propinsi DIY, khususnya terkait dengan aspek tata ruang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengkaji potensi dan perkembangan wilayah beserta basis kegiatan ekonomi pada desa-desa di kawasan lereng Merapi Propinsi DIY.
2. Menentukan tipologi desa-desa di Propinsi DIY berdasarkan potensi dan perkembangan wilayahnya dan tata ruang.
3. Menganalisis variasi keruangan potensi perkembangan wilayah kawasan lereng Merapi Propinsi DIY menurut tata ruang dan peruntukan fungsi kawasan

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu geografi, terutama aspek metodologis pada kajian geografi regional, khususnya didalam pengkajian perkembangan wilayah yang terkait dengan aspek fisik (fisiografi) dan tata ruang wilayah. Bagi penentu kebijaksanaan, penelitian ini dapat membantu Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) baik pada kabupaten maupun kota dan propinsi, dan instansi lain yang terkait dengan penanganan tata ruang dan manajemen daerah sehingga pada akhirnya tercapai keselarasan, keterpaduan dan keserasian pembangunan di kawasan lereng selatan Merapi Propinsi DIY.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Wilayah studi meliputi seluruh daerah yang ditetapkan dalam PERDA nomor 47 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai zone tengah Kawasan Pengembangan Lereng Merapi. Secara morfologis berada pada lereng Gunung Merapi dari atas hingga bawah, yaitu meliputi desa-desa yang tersebar di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selanjutnya unit analisis yang digunakan adalah unit administratif desa, sebanyak 206 desa.

Sesuai peruntukan fungsi kawasan, semua desa memiliki dua fungsi kawasan sekaligus yaitu fungsi lindung dan budidaya. Analisis selanjutnya desa-desa tersebut dikelompokkan menjadi dua peruntukan fungsi kawasan, yaitu kawasan budidaya (lahan basah, lahan kering, kota, dan perluasan kota) dan kawasan lindung (lindung bawahan, lindung strategis dan cagar budaya dan suaka alam). Secara umum, penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif.

Metode Penelitian

1. *Data Penelitian*

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Kantor Statistik Kabupaten dan BAPPEDA. Data sekunder utama yang digunakan adalah PODES (Potensi Desa) tahun 1990 dan PODES tahun 2000. Selain itu data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi DIY, RTRW Kabupaten Sleman, dan RTRW Kabupaten Bantul, serta data, informasi, atau publikasi hasil penelitian yang relevan.

2. *Data Dan Variabel Penelitian*

Data dan Variabel penelitian yang digunakan didasarkan dari tiga dasar pendekatan atau indikator, yaitu :

- a) Potensi Perkembangan Wilayah, menggunakan indikator kependudukan, penggunaan lahan, infrastruktur, karakteristik sosial ekonomi .
- b) Basis ekonomi wilayah, menggunakan data struktur produksi atau struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan.
- c) Peruntukan kawasan, berupa data nominal yang diperoleh dari hasil analisis peta tata ruang Propinsi DIY dan Kabupaten (Sleman, Bantul, dan Yogyakarta), dimana desa-desa penelitian dikelompokkan kedalam kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- d) Secara rinci data dan variabel penelitian di sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data dan Variabel Potensi Perkembangan Wilayah dan Kaitannya dengan Tata Ruang di Kawasan Lereng Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Variabel (operasional)	Satuan/ tipe data
A	VARIABEL KONTROL : TATA RUANG WILAYAH		
1	Fungsi Lindung	1. Tidak punya fungsi lindung 2. Lindung bawahan 2. Lindung setempat 3. Cagar budaya dan atau suaka	Nominal (kategori)
2	Fungsi Budidaya	1. Budidaya pertanian lahan basah 2. Budidaya pertanian lahan kering 3. Perluasan kota (Pinggiran kota) 4. Perkotaan	Nominal (kategori)
B.	VARIABEL POTENSI PERKEMBANGAN WILAYAH		
1.	Kepadatan Penduduk	Jumlah penduduk Luas Wilayah	Jiwa/ Km2
2.	Pertumbuhan Penduduk	Jumlah penduduk tahun 1990 Jumlah penduduk tahun 2000	Persen/tahun
3.	Lahan Terbangun	1. Luas Lahan Terbangun (Permukiman dan lain-lain) 2. Luas Wilayah	Persen
4.	Penduduk Non Pertanian	Penduduk bermata pencaharian bukan pertanian 2. Jumlah Penduduk	Persen
5.	Fasilitas Sosial Ekonomi	Fasilitas Sosial (TK, SD, SLTP, SLTA, PT, Kursus, Rumah sakit, Poliklinik/RSB, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Praktek Dokter, Paramedis, Apotik, Toko Obat) =15 fasilitas Fasilitas Ekonomi (Toko, Pasar Permanen, Pasar Hewan, Toko Elektronik, SPBU, Restoran, Penyewaan Alat pesta, Bengkel, Reparasi, Hotel, tempat rekreasi, Bank, BPR, Pegadaian, KUD, Keuangan, Telpn umum, Kantor Pos, Terminal, wartel = 20 fasilitas	Persen dari total fasilitas
C.	BASIS EKONOMI		
1	struktur tenaga kerja menurut lapangan usaha	Pertanian, Industri, Pertambangan, Perdagangan Konstruksi, Keuangan, Jasa, Angkutan	Rumah tangga

Sumber : Tinjauan Pustaka dan analisis empiris.

Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang bersifat multivariabel, digunakan perangkat statistik SPSS dan Map Info untuk pemetaan. Analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. **Analisis Potensi dan Perkembangan Wilayah:** Analisis yang digunakan untuk menilai potensi perkembangan wilayah adalah Analisis Faktor dan Analisis Pergeseran. Analisis Faktor untuk menentukan potensi wilayah (data tahun 2000), sedangkan untuk mengetahui perkembangan wilayah digunakan Analisis Pergeseran dari hasil analisis faktor untuk tahun 1990 dan 2000. Berdasarkan komponen potensi dan perkembangan wilayah tersebut kemudian dilakukan pengelompokan atau tipologi wilayah seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 2. Tipologi Potensi Perkembangan Wilayah

Tipologi Wilayah	Perkembangan Wilayah Tinggi	Perkembangan Wilayah rendah
Potensi Wilayah Tinggi	<i>Tipe I</i> besar tumbuh	<i>Tipe III</i> besar stagnan
Potensi Wilayah Rendah	<i>Tipe II</i> kecil tumbuh	<i>Tipe IV</i> kecil stagnan

Pengelompokan tinggi dan rendah, dilakukan dengan analisis kluster (cluster analysis) (Muta'ali, 2001)

2. **Analisis Peruntukan Kawasan (Tata Ruang),** dilakukan dengan melakukan *overlay* antara peta RTRW Propinsi dan Kabupaten dengan peta administrasi desa. Dengan mendasarkan *fungsi dominan* (Anonim, 1990), desa-desa digolongkan menjadi dua kategori fungsi dan empat kategori rinci, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung (tabel 3)

Tabel 3. Klasifikasi Fungsi Tata Ruang (*dominan*), Desa-desa Daerah Penelitian

No.	Peruntukan fungsi ruang	Klasifikasi Rinci
1.	Kawasan Budidaya	1. Budidaya pertanian (lahan basah)
		2. Budidaya pertanian (lahan kering)
		3. Perluasan kota (Pinggiran kota)
		4. Perkotaan
2.	Kawasan Lindung	1. Lindung bawahan
		2. Lindung setempat
		3. Cagar budaya dan atau suaka
		4. Tidak punya fungsi lindung

Keterangan : Wilayah memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi lindung dan budidaya / kecuali

3. Analisis Basis Ekonomi Wilayah (Indikasi) dilakukan dengan menggunakan data struktur angkatan kerja (pekerja) menurut lapangan pekerjaan pada delapan sektor ekonomi. Teknik analisis yang digunakan adalah LQ (*Location Quotient*), yaitu :

$$\text{Location Quotient (LQ)} = (S_i / N_i) / (S / N)$$

Keterangan :

- S_i = Jumlah variabel kegiatan i di daerah penelitian
- N_i = Jumlah variabel kegiatan i di daerah yang lebih luas (acuan)
- S = Jumlah seluruh variabel kegiatan di daerah penelitian
- N = Jumlah seluruh variabel kegiatan di daerah yang lebih luas

Jika $LQ > 1$, terdapat indikasi bahwa sektor tersebut menjadi basis ekonomi wilayah. Sebaliknya jika $LQ < 1$, maka sektor tersebut tergolong non-basis.

4. Analisis Pola Persebaran, dilakukan dengan melakukan deskripsi terhadap hasil pemetaan potensi dan perkembangan wilayah (serta tipologinya). Dalam analisis ini juga dianalisis variasinya menurut peruntukan fungsi kawasan, khususnya untuk menganalisis persamaan dan perbedaan potensi perkembangan wilayah pada berbagai tipe fungsi kawasan, seperti kawasan lindung, resapan air, budidaya pertanian, perkotaan dan lain-lain. Untuk analisis terakhir digunakan *analisis deskriminan* (Muta'ali, 2001).

Analisis akhir merupakan perumusan usulan tentang pengembangan sistem tata ruang di Propinsi DIY, khususnya di kawasan lereng Merapi. Tahap ini merupakan sintesis dari hasil analisis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Rekomendasi dapat berbentuk spasial dan non spasial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Wilayah Pedesaan Menurut Fungsi Tata Ruang Wilayah

Zona Tengah (Kawasan Pengembangan Lereng Merapi) mencakup seluruh daerah di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Bagian atas, diarahkan sebagai kawasan lindung, yang terdiri dari hutan lindung dan kawasan lindung bawahan, khususnya kawasan resapan air. Bagian bawah sampai garis pantai, diarahkan sebagai kawasan budidaya pertanian, dengan pengecualian untuk area-area yang ditetapkan sebagai cagar budaya, kawasan lindung setempat dan kawasan lindung sempadan pantai. Sepanjang jalur Yogyakarta-Magelang, Yogyakarta-Solo, dan Yogyakarta-Parangtritis, serta area *Greater Yogyakarta*, dikembangkan sebagai kawasan budidaya non pertanian (PERDA Propinsi DIY Nomor 47 tahun 1998). Berdasarkan fungsi tata ruang wilayah, desa-desa di daerah penelitian dapat digolongkan menjadi dua kategori fungsi dan empat kategori rinci, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung (tabel 4).

Tabel 4. Tipologi Wilayah Perdesaan Menurut Peruntukan Fungsi kawasan di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY

Peruntukan Fungsi Kawasan	Bantul		Sleman		Yogyakarta		Total	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
A. Kawasan Budidaya *)								
1. Budidaya pertanian (lahan basah)	48	64	37	43			85	41,3
2. Budidaya pertanian (lahan kering)	16	21,3	38	44,2			54	26,2
3. Perluasan kota (Pinggiran kota)	9	12,0	9	10,5			18	8,7
4. Perkotaan	2	2,7	2	2,3	45	100	49	23,8
Jumlah	75	100	86	100	45	100	206	100
B. Kawasan Lindung*)								
1. Lindung bawahan	14	18	35	40,7			49	23,8
2. Lindung setempat	27	36,0	4	4,7			31	15,0
3. Cagar budaya dan atau suaka	1	0,7	7	8,1			8	3,4
4. Tidak punya fungsi lindung **)	33	43,3	40	46,5	45	100	118	57,8
Jumlah	75	100	86	100	45	100	206	100

Sumber : Hasil analisis peta administrasi dan peta RTRW dan Kabupaten dan Propinsi

Keterangan : *) Wilayah memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi lindung dan budidaya, sehingga jumlah desa antara fungsi budidaya dan lindung adalah sama.

**) wilayah yang tidak memiliki fungsi lindung, berarti terdapat dominasi peran fungsi budidaya (misal desa-desa di kota Yogyakarta dan pinggiran kota)

Dalam kategori kawasan budidaya, dari 206 desa penelitian, 41,3 % atau 85 desa memiliki fungsi dominan sebagai budidaya pertanian lahan basah, yang dicirikan dengan budidaya sawah irigasi. Berikutnya adalah budidaya pertanian lahan kering sebanyak 54 desa atau 26,2%. Kawasan tersebut di atas tersebar merata di kabupaten Sleman dan Bantul, sedangkan Kota Yogyakarta semua desa memiliki fungsi dominan sebagai kawasan permukiman perkotaan. Selain itu juga terdapat fungsi khusus perluasan kota yang berada di daerah pinggiran kota (tabel 4).

Untuk kajian fungsi lindung, maka tidak semuanya memiliki fungsi lindung. Lebih dari separuh desa penelitian tidak memiliki fungsi lindung (57%), yang tersebar di 3 kabupaten dan khususnya Kota Yogyakarta. Desa yang memiliki fungsi lindung bawahan, seperti hutan lindung dan resapan air sebanyak 49 desa, yang sebagian besar (35 desa) berada di kabupaten Sleman, khususnya lereng atas Merapi yang berfungsi sebagai daerah resapan air, selebihnya 14 desa di kabupaten Bantul, khususnya di kecamatan Imogiri dan Dlingo. Sedangkan desa yang memiliki fungsi lindung setempat, seperti sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan pantai tersebar di 31 desa di kabupaten Sleman dan Bantul. Sedangkan untuk kawasan Cagar budaya terkonsentrasi di sekitar kecamatan Kalasan dan Prambanan Kabupaten Sleman. Dalam bagian berikutnya di lakukan analisis yang menarik, khususnya hubungan antara potensi perkembangan wilayah di masing-masing fungsi kawasan tersebut.

Potensi dan Perkembangan Wilayah Kawasan Lereng Merapi

1. Potensi Wilayah Desa-Desa di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY

Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap lima indikator penentu potensi wilayah (kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, penduduk non pertanian, lahan terbangun, dan fasilitas sosial ekonomi) dihasilkan skor faktor yang menunjukkan urutan potensi wilayah desa-desa di kawasan lereng Merapi Propinsi DIY. Semakin besar nilai skor, semakin tinggi potensi wilayahnya. Selanjutnya skor tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok dengan dasar nilai positif dan negatif dari nilai faktor. Nilai positif berarti potensi wilayah desa tinggi, sebaliknya jika negatif, maka potensi wilayah desa rendah (Lampiran-1).

Menurut fungsi kawasan budidaya, potensi wilayah menunjukkan dua kondisi kontras, antara budidaya pertanian lahan basah dan lahan kering dengan perkotaan dan perluasannya. Sebagian besar perkotaan dan perluasan kota memiliki skor potensi tinggi (98% dan 77,8%), sedangkan untuk budidaya pertanian lahan kering dan lahan basah lebih dari 85% berpotensi rendah (tabel 5). Hal ini juga terjadi pada fungsi lindung, dimana desa-desa yang tidak memiliki fungsi lindung, nilai indek potensi wilayahnya jauh lebih tinggi dari kawasan lindung bawahan, lindung setempat, dan cagar budaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pola perkembangan wilayah yang tinggi belum terlalu menjangkau fungsi kawasan lindung, kecuali di beberapa di desa di daerah resapan air Kabupaten Sleman.

Tabel 5. Potensi Wilayah Desa-desa di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY menurut Fungsi Kawasan Budidaya dan Lindung

Klasifikasi Potensi wilayah	Indeks Potensi Wilayah Desa-desa pada Peruntukan Fungsi Budidaya							
	Lahan basah		Lahan kering		Kota		Perluasan kota	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Tinggi	14	16.5	6	11.1	48	98	14	77.8
Rendah	71	83.5	48	88.9	1	2.0	4	22.2
Jumlah	85	100	54	100	49	100	18	100
Klasifikasi Potensi wilayah	Indeks Potensi Wilayah Desa-desa pada Peruntukan Fungsi Lindung							
	Tidak punya		Lin. setempat		Lin. Bawahan		CgrBudaya-ska	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Tinggi	70	59.3	3	9.7	4	8.2	2	25.0
Rendah	48	40.7	28	90.3	45	91.8	6	75.0
Jumlah	118	100	31	100	49	100	8	100

Sumber : Hasil analisis Faktor. (tinggi = nilai skor faktor positif : rendah = nilai skor faktor negatif)

2. Perkembangan Wilayah Desa-Desa di Kawasan lereng Merapi

Dengan menggunakan analisis pergeseran sederhana yang membandingkan nilai skor potensi wilayah tahun 2000 dan 1990 diperoleh perubahannya. Selama sepuluh tahun perubahan berlangsung dengan dinamis, gejala naik turunnya indek potensi wilayah secara

Tabel 6. Perkembangan Indeks Potensi Wilayah Desa-Desa di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY Tahun 1990 hingga 2000 di menurut Fungsi Kawasan

Klasifikasi Perkembangan wilayah	Perkembangan Wilayah Desa-desanya pada peruntukan fungsi Budidaya							
	Lahan basah		Lahan kering		Kota		Perluasan kota	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Naik	34	40.0	23	42.6	27	55.1	12	66.7
Turun	51	60.0	31	57.4	22	44.9	6	33.3
Jumlah	85	100.0	54	100.0	49	100.0	18	100.0
Klasifikasi	Perkembangan Wilayah Desa-desanya pada peruntukan fungsi Lindung							
	Tidak punya		Lin. Setempat		Lin. Bawah		CgrBudaya-ska	
Naik	63	53.4	11	35.5	18	36.7	5	62.5
Turun	55	46.6	20	64.5	31	63.3	3	37.5
Jumlah	118	100.0	31	100.0	49	100.0	8	100.0

Sumber : Hasil analisis Faktor. (Naik = nilai skor faktor bertambah ; Turun = nilai skor faktor berkurang)

Klasifikasi berdasarkan fungsi kawasan budidaya, menunjukkan bahwa pertumbuhan cepat yang ditandai dengan kenaikan nilai skor potensi terdapat pada desa-desa di pinggiran kota (perluasan kota) yang mencapai 12 desa atau 66,7% dari desa yang ada dan untuk kota (55,1%). Sedangkan desa pada fungsi pertanian lahan kering yang mengalami kenaikan sebesar 23 desa (42,6%) dan lahan basah (40%). Sebaliknya menurut fungsi lindung, peningkatan skor terdapat di desa-desa yang tidak memiliki fungsi lindung (53,4%) dan cagar budaya (62,5%). Hal ini wajar karena fungsinya lebih banyak pada budidaya, namun untuk desa dengan fungsi cagar budaya, perkembangan yang tinggi perlu diantisipasi dengan baik, supaya tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Sedangkan desa-desa yang memiliki fungsi lindung bawahan dan setempat cenderung lebih banyak mengalami penurunan (tabel 6).

Perhatian yang lebih serius ditujukan kepada 18 desa yang memiliki fungsi lindung bawahan (terutama sebagai kawasan resapan air), namun mengalami pertumbuhan tinggi (naik). Jika perkembangan wilayah seperti pembangunan perubahan dan fasilitas perkotaan tidak dapat dikontrol, akan berpotensi besar menurunkan kemampuan resapan dan degradasi lingkungan, tidak hanya di kawasan tersebut, tetapi juga kawasan di bawahnya.

3. Tipologi Potensi dan Perkembangan Wilayah Desa-Desa di Kawasan Lereng Merapi

Berdasarkan analisis potensi dan perkembangan wilayah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dibuatlah tipologi potensi perkembangan wilayah (lihat tabel 1), yang terdiri dari empat tipologi, yaitu tipe I (besar tumbuh), tipe II (kecil tumbuh), tipe III (besar stagnan), dan tipe IV (kecil, stagnan)⁴.

⁴ Besar kecilnya potensi wilayah ditentukan oleh tinggi rendahnya indeks potensi wilayah (lihat

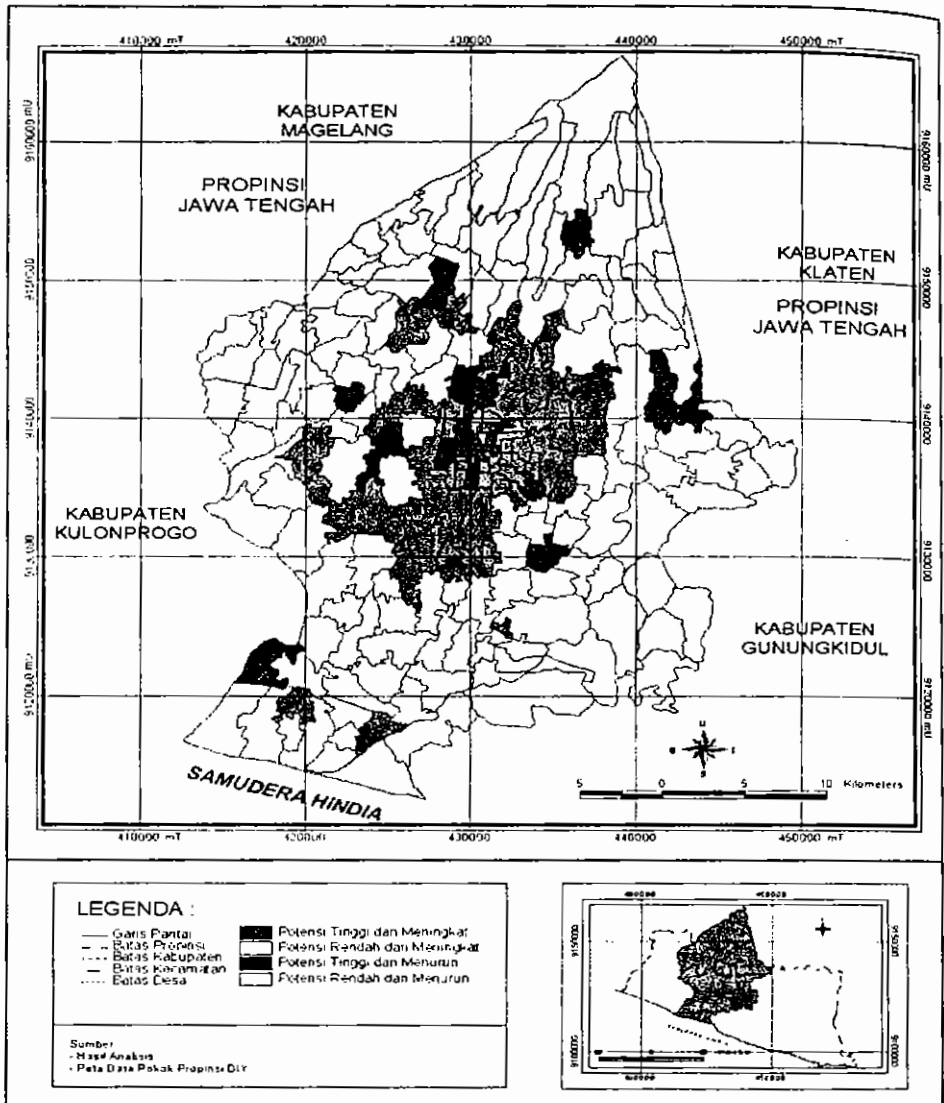
Berdasarkan peruntukan fungsi kawasan budidaya, desa-desa di kawasan lahan basah sebagian besar berada pada tipe IV (54,1%), demikian pula halnya dengan desa berfungsi lahan kering. Yang menarik, cukup banyaknya desa-desa di dua fungsi tersebut yang berada pada tipe II, yaitu meskipun potensinya kecil namun ada kecenderungan meningkat. Sedangkan desa yang berfungsi kota dan perluasan kota terletak antara tipe I dan III. Tipe III menunjukkan adanya kejenuhan perkembangan wilayah kota yang mencapai hampir separoh kota (44,9%). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perkembangan wilayah dari yang semula di desa dengan fungsi kota ke pinggiran kota dan fungsi lahan kering (tabel 7).

Tabel 7. Tipologi Wilayah Desa-Desa di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY Tahun 1990 hingga 2000 menurut Fungsi Kawasan Lindung dan Budidaya

Tipologi Wilayah	Perkembangan Wilayah Desa-desa pada peruntukan fungsi Budidaya							
	Lahan basah		Lahan kering		Kota		Perluasan kota	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Tipe I (besar, tumbuh)	9	10.6	4	7.4	26	53.1	11	61.1
Tipe II (kecil, tumbuh)	25	29.4	19	35.2	1	2.0	1	5.6
Tipe III (besar, stagnan)	5	5.9	1	1.9	22	44.9	3	16.7
Tipe IV (kecil, stagnan)	46	54.1	30	55.6	0	0.0	3	16.7
Jumlah	85	100.0	54	100.0	49	100.0	18	100.0
Tipologi Wilayah	Perkembangan Wilayah Desa-desa pada peruntukan fungsi Lindung							
	Tidak punya		Lin. Setempat		Lin. Bawah		Cgr Budaya-ska	
Tipe I (besar, tumbuh)	45	38.1	1	3.2	3	6.1	0	0.0
Tipe II (kecil, tumbuh)	19	16.1	10	32.3	15	30.6	4	50.0
Tipe III (besar, stagnan)	25	21.2	2	6.5	1	2.0	2	25.0
Tipe IV (kecil, stagnan)	29	24.6	18	58.1	30	61.2	2	25.0
Jumlah	118	100.0	31	100.0	49	100.0	8	100.0

Sumber : Hasil analisis Faktor.

Analisis tipologi potensi perkembangan pada peruntukan fungsi lindung lebih difokuskan pada desa-desa yang memiliki fungsi lindung bawahan. Terdapat 18 desa tipe I dan II di kawasan lindung bawahan dan 4 desa tipe I di cagar budaya, yang sebagian besar terletak di Kabupaten Sleman. Perkembangan wilayah tipe I dan II di kawasan resapan air tersebut selain dapat memberikan dampak positif, juga dimungkinkan munculnya dampak penurunan fungsi lingkungan. Berdasarkan analisis tabel 8, sebanyak 49 dan 48 desa memiliki tipe I dan II sebaliknya tipe III dan IV berjumlah 109 desa (52,9%). Tipe I terbanyak terdiri dari desa di Kota Yogyakarta, tipe II Kabupaten Sleman dan Bantul sama yaitu 30%. Tipe III juga didominasi desa-desa dari Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, di kota Yogyakarta, selain mengalami pertumbuhan wilayah yang besar, beberapa wilayah juga Gambar 1.



Gambar 1. Peta Tipologi Potensi Perkembangan Wilayah di Pedesaan Kawasan Lereng Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 8. Tipologi Wilayah Desa-Desa di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY Tahun 1990 hingga 2000 menurut Kabupaten

Tipologi Wilayah	Bantul		Sleman		Yogyakarta		Total	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Tipe I (besar, tumbuh)	14	18.7	11	12.8	24	53.3	49	23.8
Tipe II (kecil, tumbuh)	22	29.3	26	30.2	0	0	48	23.3
Tipe III (besar, stagnan)	3	4.0	6	7	21	46.7	30	14.6
Tipe IV (kecil, stagnan)	36	48.0	43	50	0	0	79	38.3
Jumlah	75	100	86	100	45	100	206	100

Sumber : Hasil perubahan analisis Faktor.

Terkait dengan tata ruang yang memfungsikan sebagian besar Kabupaten Sleman sebagai kawasan resapan air dan Kabupaten Bantul sebagai daerah pertanian, maka besarnya jumlah wilayah tipe I dan II di dua kabupaten tersebut perlu di kelola dan dimonitor dengan baik, karena dapat berpotensi menimbulkan 'konflik' pemanfaatan ruang antara pertanian dan non pertanian dan antara kawasan resapan air dengan pembangunan perumahan. Sebaliknya wilayah tipe IV, yang relatif tertinggal memerlukan perhatian serius guna pengembangan wilayahnya.

Variasi Potensi Perkembangan Wilayah

Analisis dengan menggunakan tipologi wilayah menurut fungsi kawasan sebagai dasar dalam melakukan determinasi atau pembedaan antar desa mendapatkan dukungan empiris. Dengan menggunakan analisis deskriminan, diuji perbedaan tingkat potensi perkembangan wilayah (hasil komposit dari lima indikator perkembangan wilayah)⁵ antar tipologi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan hasil analisis deskriminan (tabel 9), masing-masing peruntukan memiliki perbedaan potensi dan perkembangan wilayah secara menyakinkan dengan tingkat signifikan tinggi (antara .005 sampai .000).

Tabel 9. Hasil Analisis Deskriminan Potensi perkembangan Wilayah menurut Peruntukan Fungsi Kawasan Budidaya (menunjukkan perbedaan antar fungsi kawasan)

Kawasan Budidaya	Tingkat Signifikasi	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Perkotaan	Perluasan (Pinggiran)Kota
Pertanian Lahan Basah	F Sig.		8.071 .005	199.919 .000	13.342 .000
Pertanian Lahan Kering	F Sig.	8.071 .005		243.984 .000	28.394 .000
Perkotaan	F Sig.	199.919 .000	243.984 .000		33.796 .000
Perluasan (pinggiran)Kota	F Sig.	13.342 .000	28.394 .000	33.796 .000	

Sumber : Hasil analisis Deskriminan.

Perbedaan antar fungsi yang paling besar adalah antara wilayah berfungsi perkotaan dengan pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah, hal ini terlihat dari nilai uji F yang besar. Sebaliknya antara perkotaan dan perluasan kota, lahan basah dan lahan kering menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu kuat. Perbedaan yang kecil antara daerah pinggiran kota dan pertanian lahan basah menunjukkan bahwa wilayah pinggiran kota sebagian besar digunakan untuk pertanian sawah. Sedangkan perbedaan yang lemah antara pertanian lahan basah dan lahan kering menunjukkan bahwa potensi perkembangan wilayah pada dua fungsi tersebut relatif sama. Berdasarkan analisis lanjutan deskriminan, faktor pembeda perbedaan tersebut adalah adalah persentase lahan terbangun dan kepadatan penduduk.

Untuk peruntukan kawasan lindung, perbedaan yang paling signifikan khususnya antara desa yang tidak memiliki fungsi lindung dengan desa yang memiliki fungsi lindung, baik lindung bawahan, setempat maupun cagar budaya. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi dan uji F, sedangkan antar fungsi lindung tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, seperti lindung bawahan dan lindung setempat dan cagar budaya (tabel 10). Dengan demikian, terdapat perbedaan potensi perkembangan wilayah antara wilayah-wilayah yang memiliki fungsi budidaya dan fungsi lindung. Berdasarkan analisis deskriminan, faktor pembeda perbedaan antar fungsi tersebut adalah kepadatan penduduk dan persentase penduduk non pertanian.

Tabel 10. Hasil Analisis Deskriminan Potensi perkembangan Wilayah menurut Peruntukan Fungsi kawasan Lindung (menunjukkan perbedaan antar fungsi kawasan)

Kawasan Lindung	Tingkat Signifikansi	Lindung setempat	Lindung bawahan	Cagar Budaya	Tidak berfungsi lindung *
Lindung setempat	F Sig.		2.753 .099	.005 .941	47.979 .000
Lindung bawahan	F Sig.	2.753 .099		1.038 .309	109.661 .000
Cagar Budaya	F Sig.	.005 .941	1.038 .309		12.332 .001
Tidak berfungsi lindung *	F Sig.	47.979 .000	109.661 .000	12.332 .001	

Sumber : Hasil analisis Deskriminan.

*) tidak berfungsi lindung, berarti terdapat dominasi fungsi budidaya

Perbedaan yang signifikan ini memberikan dukungan bahwa tipologi tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan determinasi atau pengelompokan terhadap fenomena potensi perkembangan wilayah di kawasan lereng Merapi, Propinsi DIY.

Basis Ekonomi Tipologi Potensi dan Perkembangan Wilayah

Sebagaimana dijelaskan pada bab dua, untuk memberikan kajian yang lebih komprehensif, dilakukan analisa basis ekonomi desa. Data diperoleh dari struktur pekerjaan di delapan sektor kegiatan ekonomi. Asumsi yang digunakan adalah dalam mewujudkan kegiatan pembangunan yang serasi, harus ada keserasian antara basis kegiatan ekonomi dengan fungsi kawasan. Sebagai contoh, kegiatan industri memiliki keserasian dengan kawasan lahan kering, sebaliknya kawasan lahan basah bertentangan dengan industri. Demikian halnya untuk kawasan lindung bawahan, maka kegiatan-kegiatan pertanian lebih tepat dibanding kegiatan lain, karena tidak bertentangan dengan fungsi kawasan. Selain itu semakin banyak jumlah basis kegiatan ekonomi, semakin baik kondisi ekonomi wilayah, karena perekonomian semakin terdiversifikasi dan memberikan peluang usaha yang beranekaragam sehingga dapat mengurangi tekanan penduduk terhadap lingkungan.

Sebagian besar desa, yaitu 57 atau 27,7% desa memiliki 3 jenis basis kegiatan ekonomi. Dari jumlah tersebut terbanyak berasal dari tipologi wilayah IV. Desa yang memiliki jumlah basis 1-2 masih cukup banyak terutama berasal dari tipe II dan tipe IV (kecil stagnan). Sebaliknya yang agak mengagetkan adalah adanya beberapa wilayah yang memiliki sektor basis lebih dari 5 basis pada tipe I dan II. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara potensi perkembangan wilayah yang tinggi dengan jumlah kegiatan atau basis ekonomi wilayah. Kondisi sebaliknya, pada wilayah tipe IV yang kurang berkembang, maka jumlah basis ekonominya juga semakin sedikit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Kegiatan Basis Ekonomi menurut Tipologi Wilayah Desa-Desa di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY

Jumlah sektor basis	Jumlah Desa		Jumlah Kegiatan Sektor Basis Pengembangan Wilayah							
			Tipe I (besar, tumbuh)		Tipe II (kecil, tumbuh)		Tipe III (besar, stagnan)		Tipe IV (kecil, stagnan)	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
1	38	18.4	5	10.2	12	25.0	4	13.3	15	19.0
2	44	21.4	14	28.6	11	22.9	3	10.0	16	20.3
3	57	27.7	11	22.4	9	18.8	12	40.0	25	31.6
4	40	19.4	5	10.2	13	27.1	8	26.7	16	20.3
5	23	11.2	11	22.4	2	4.2	3	10.0	7	8.9
6	3	1.5	2	4.1	1	2.1		0.0		0.0
7	1	0.5	1	2.0	0	0.0		0.0		0.0
Jumlah	206	100.0	49	100.0	48	100.0	30	100.0	79	100.0

Sumber : Hasil analisis data PODES

Berdasarkan jenis kegiatan basis delapan sektor ekonomi tampak bahwa persebaran basis ekonomi tersebar relatif merata disemua tipologi wilayah. Namun demikian sebagian

atau mencapai 59,7%. Selebihnya Industri, jasa, angkutan, perdagangan, konstruksi yang masing-masing tersedia di kurang lebih 30% desa (Tabel 12). Sektor pertanian terbesar menjadi basis bagi daerah-daerah yang memiliki tipologi II dan IV yang relatif kurang berkembang. Sektor industri menjadi basis di bagian terbesar tipe IV dan tipe I. Dengan demikian ada keterkaitan antara jenis basis ekonomi dengan tingkat perkembangan wilayah, yaitu pada wilayah tipe I dan II yang memiliki perkembangan tinggi dicirikan oleh makin banyaknya jenis basis ekonomi non pertanian (industri dan jasa), sebaliknya pada tipe IV yang kurang berkembang masih didominasi sektor pertanian.

Tabel 12. Jenis Kegiatan Basis Ekonomi menurut Tipologi Potensi Perkembangan Wilayah Desa-Desa di Kawasan Lereng Merapi Propinsi DIY

Sektor Basis	Jumlah Desa *)		Jenis Kegiatan Sektor Basis Pengembangan Wilayah							
			Tipe I (besar, maju)		Tipe II (Kecil, maju)		Tipe III (besar, lamban)		Tipe IV (kecil lamban)	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Pertanian	123	59.7	9	18.4	44	91.7	1	3.3	69	87.3
Industri	80	38.8	18	36.7	15	31.3	11	36.7	36	45.6
Pertambangan	47	22.8	4	8.2	20	41.7	2	6.7	21	26.6
Perdagangan	64	31.1	29	59.2	6	12.5	18	60	11	13.9
Konstruksi	74	35.9	14	28.6	22	45.8	9	30	29	36.7
Keluangan	28	13.6	10	20.4	1	2.1	10	33.3	7	8.9
Jasa	81	39.3	36	73.5	5	10.4	22	73.3	18	22.8
Angkutan	63	30.6	24	49.0	11	22.9	11	36.7	17	21.5

Sumber : Hasil analisis data PODES

Keterangan : *) Masing-masing desa umumnya memiliki lebih dari satu jenis kegiatan basis ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pola perkembangan wilayah di kawasan lereng merapi Propinsi DIY mengkonsentrasi di bagian tengah (kota Yogyakarta dan pinggiran) dan menuju kearah lereng atas (Kabupaten Sleman). Hal ini ditunjukkan, lebih dari 50% wilayah tipe I (besar tumbuh) dan tipe II (kecil tumbuh) berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
2. Analisis basis ekonomi juga menunjukkan bahwa potensi perkembangan wilayah tinggi, akan diiringi oleh pergeseran menguatnya peran sektor non pertanian. Sektor industri dan jasa berada pada wilayah Tipe I, sebaliknya pertanian mendominasi wilayah Tipe IV (kecil stagnan) yang mencapai 87,3%.
3. Analisis pada fungsi budidaya menunjukkan, sebagian besar wilayah bertipe I berada di daerah perkotaan dan perluasannya sedangkan wilayah tipe II (kecil tumbuh)

lindung, khususnya lindung bawahan (resapan air), terdapat 36,7% (18 desa) yang berpotensi berkembang pesat.

4. Analisis dengan menggunakan tipologi wilayah menurut fungsi kawasan sebagai dasar dalam melakukan determinasi atau pembedaan antar desa memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Terdapat perbedaan yang sangat nyata potensi perkembangan wilayah desa-desa di kawasan lereng Merapi Propinsi DIY antara desa menurut fungsi kawasan lindung dan budidaya, serta antar jenis peruntukan fungsi budidaya.

Saran

Temuan-temuan penelitian ini penting untuk ditindaklanjuti sebagai masukan bagi pemerintah daerah guna mengembangkan kebijakan perkembangan wilayah di kawasan lereng Merapi Propinsi DIY.

1. Dalam konteks pengembangan perkotaan Yogyakarta, perlu adanya pergeseran arah perkembangan, yaitu dari perkembangan wilayah yang mengkonsentrasi di bagian tengah (kota Yogyakarta dan pinggirannya) dan utara, digeser perkembangannya menuju arah barat dan timur-selatan, yaitu ke arah Sedayu dan Jalan Wates dan Piyungan, Banguntapan, Pleret.
2. perlunya kontrol dan pengendalian wilayah yang bertipe I (besar tumbuh) dan tipe II (kecil tumbuh). Wilayah tipe I umumnya berada di kawasan budidaya (kota dan perluasan kota) yang perkembangannya cenderung tidak terkontrol, sedangkan wilayah tipe II umumnya berada di lahan pertanian subur dan kawasan lindung, sehingga relatif rawan konflik.
3. Perlunya penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan pembentukan tata ruang perwilayahan dan pembentukan sistem kota-kota yang mempunyai hirarki yang sistematis dan fungsional, sehingga memiliki jalinan keterkaitan yang baik.
4. Perlunya penekanan redistribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah, terutama desa-desa yang memiliki potensi perkembangan wilayah rendah (tipe IV, kecil mundur). Redistribusi harus memperhatikan peranan fungsi kawasan. Determinan fungsi kawasan harus dijadikan sebagai dasar bagi pelaksanaan pembangunan di kawasan lereng Merapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990. *Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*. Jakarta
- Anonim, 1993. *Sensus Pertanian Tahun 1993*. Badan Pusat Statistik. Propinsi DIY. Yogyakarta.
- Anonim, 1998. *Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 47 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY*. Bappeda Propinsi DIY. Yogyakarta.

- Tjokroaminoto, Bintoro, 1983. *Pengantar Pembangunan*. Andi. Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik, 1988. *Klasifikasi Desa Urban dan Desa Rural Berdasarkan PODES-SE 1988*. BPS. Jakarta.
- Budihardjo, Eko, 1995. *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Djajadiningrat, Surma T., 1995. *Peranan Kebijakan Lingkungan dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. HMTL-ITB. Bandung
- Douglass, Ian, 1991. *The Urban Environment*. Edward Arnold. London.
- Douglass, M., 1991. *Planning for Environmental Sustainability in The Extended Jakarta Metropolitan Region*. Hawaii University Press.
- Dwiatmo, S., 1991. *Perencanaan Pengelolaan Daerah Resapan*. PPLH-UGM: Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagus, 1991. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. PPK-UGM. Yogyakarta
- McDonald and Partner, 1984. *Greater Yogyakarta*, Vol I. Departemen of Public Works. Jakarta.
- Muta'ali dan Risyanto, 2000. *Pola perkembangan Perumahan di Pinggiran Kota Yogyakarta*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta
- Muta'ali, Luthfi, 2000. *Pola Perkembangan Karakteristik Kekotaan di Perdesaan Propinsi DIY*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta
- Muta'ali, Luthfi, 2001. *Perwilayahan Dengan Menggunakan Teknnik Statistik*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.
- Ricardson, Harry, 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 1992. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta.
- Sudarmadji, 1996. *Pengelolaan Kawasan Yogya Utara Dalam Tinjauan Hidrologi*. Paper disajikan dalam Diskusi Mahasiswa 10 Desember 1996. "Pengelolaan Kawasan Utara Yogyakarta". Yogyakarta. Fakultas Geografi UGM.
- Sugandhy, Aca, 1992. Penataan Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal PWK, nomor 5, Tahun III/September 1992*. Teknik Planologi ITB. Bandung
- Sugandhy, Aca, 1994. Penataan Ruang Sebagai Piranti Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal PWK, nomor 16, Desember 1994*. Teknik Planologi ITB. Bandung
- Sujarto, Joko, 1988. *Urbanization In Indonesia : A Descriptive Picture of The Problem And The Prospects*. Teknik Planologi ITB. Bandung.
- Sutikno, dkk., 1995. Environment Degradation of Urban Area on Fluvio Volcanic Plain (Case Studi of Yogyakarta). *The Indonesian Journal of Geography*. Faculty of Geography, Gadjah Mada University, Yogyakarta..
- Todaro, M., 1983. *Pembangunan Ekonomi Di negara Sedang Berkembang*. Ghalia Indonesia Jakarta

ID	Desa	K	B D	K L	Skor faktor 1 dan 2 Tahun 1990	Skor faktor 1 dan 2 tahun 2000	Total skor potensi wilayah	PRB POT WL	Tipo- logi			
3402090007	Imogiri	2	2	2	15.02	-12.27	4.63	-1.49	2.75	3.14	0.39	1
3402090008	Wukirsari	2	2	2	-20.56	-1.45	-22.93	-18.59	-22.01	-41.52	-19.51	4
3402100001	Mangunan	2	2	2	-36.56	-0.77	-47.98	-11.87	-37.33	-59.85	-22.52	4
3402100002	Muntuk	2	2	2	-15.92	-28.22	-65.25	1.76	-44.14	-63.49	-19.35	4
3402100003	Dlingo	2	2	2	-44.54	27.68	-21.33	-17.25	-16.85	-38.58	-21.72	4
3402100004	Temuwuh	2	2	2	-26.4	-16.79	-48.25	0.3	-43.19	-47.94	-4.75	4
3402100005	Jatimulyo	2	2	2	-18.76	-51.24	-57.1	-1.2	-70	-58.3	11.71	2
3402100006	Terong	2	2	2	-46.82	15.34	-23.76	-17.7	-31.48	-41.45	-9.98	4
3402110001	Wonokromo	2	1	0	-12.54	4.9	5.08	-24.54	-7.64	-19.46	-11.81	4
3402110002	Pleret	2	1	1	-19.47	45.12	49.25	-26.73	25.65	22.51	-3.14	3
3402110003	Segoroyoso	2	1	1	-32.46	-15.32	-10.14	-21.96	-47.79	-32.11	15.68	2
3402110004	Bawuran	2	2	1	-16.18	-39.08	-40.9	0.96	-55.27	-39.94	15.33	2
3402110005	Wonolelo	2	2	0	-15.45	-40.37	-47.8	3.01	-55.82	-44.78	11.04	2
3402120001	Sitimulyo	2	1	1	-15.84	-20.89	-11.81	-31.77	-36.74	-43.58	-6.84	4
3402120002	Srimulyo	2	1	1	-38.81	59.76	20.31	-42.04	20.95	-21.73	-42.68	4
3402120003	Srimartani	2	1	1	-17.96	-14.98	1.91	-36.66	-32.94	-34.75	-1.81	4
3402130001	Tamanan	2	4	0	-15.42	-4.64	-24.45	-8.48	-20.05	-32.93	-12.88	4
3402130002	Jagalan	2	4	0	48.23	16.47	26.06	24.75	64.7	50.82	-13.89	3
3402130003	Singosaren	2	1	0	15.38	-28.4	-20.78	18.16	-13.02	-2.62	10.4	2
3402130004	Wirokerten	2	1	0	-6.52	-23.64	-6.59	-13.47	-30.17	-20.06	10.11	2
3402130005	Jambidan	2	1	1	-17.5	-12.63	-29.59	-2.95	-30.13	-32.55	-2.42	4
3402130006	Potorono	2	1	1	-24.52	-12.78	-26.87	-5.07	-37.3	-31.94	5.36	2
3402130007	Baturetno	2	4	0	-27.53	21.89	33.17	-17.03	-5.64	16.14	21.78	1
3402130008	Banguntapan	2	4	0	-10.64	41.54	85	-50.1	30.9	34.9	4	1
3402140001	Pendowoharjo	2	1	0	-6.66	-3.85	31.84	-12.18	-10.52	19.66	30.18	1
3402140002	Timbulharjo	2	1	0	-16.31	-5.7	24.78	-19.42	-22.01	5.36	27.37	1
3402140003	Bangunharjo	2	4	0	-19.47	26.76	85.71	-41.47	7.29	44.23	36.94	1
3402140004	Panggungharjo	2	4	0	-0.94	45.74	85.34	-32.3	44.8	53.04	8.25	1
3402150001	Bangunjiwo	2	1	0	-3.94	-19.65	8.37	1.12	-23.59	9.5	33.08	1
3402150002	Tirtomimolo	2	4	0	-17.75	39.37	37.43	-8.77	21.62	28.65	7.03	1
3402150003	Tamanirtito	2	4	0	-7.76	6.35	-22.16	-17.61	-1.42	-39.77	-38.35	4
3402150004	Ngestiharjo	2	4	0	6.5	23.56	62.7	-20.15	30.06	42.56	12.5	1
3402160001	Triwidadi	2	1	1	-33.61	-20.96	-28.1	9.77	-54.57	-18.33	36.24	2
3402160002	Sendangsari	2	2	1	-47.34	3.06	-15.59	1.22	-44.27	-14.37	29.9	2
3402160003	Guwosari	2	2	0	-39.75	-17.9	-30.62	-0.99	-57.65	-31.6	26.05	2
3402170001	Argodadi	2	1	1	-24.93	-13.71	-51.58	-14.49	-38.64	-66.08	-27.43	4
3402170002	Argorejo	2	1	0	-21.02	5.64	-36.54	-7.53	-15.37	-44.06	-28.69	4
3402170003	Argosari	2	1	1	-34.32	-2.71	-23.56	-20.29	-37.03	-43.85	-6.82	4
3402170004	Argomulyo	2	1	0	-33.92	32.22	20.91	-19.75	-1.7	1.16	2.86	1
3404010001	Sumberrahayu	4	1	1	-36.06	-9	-28.59	-18.39	-45.07	-46.98	-1.91	4
3404010002	Sumbersari	4	1	1	-35.84	-10.59	-41.49	-9.91	-46.43	-51.4	-4.97	4
3404010003	Sumber Agung	4	1	1	-30.9	48.48	25.05	-29.09	17.58	-4.04	-21.63	4

ID	Desa	K	B D	K L	Skor faktor 1 dan 2 Tahun 1990		Skor faktor 1 dan 2 tahun 2000		Total skor potensi wilayah		PRB POT WL	Tipe- logi
3404100004	Selo Martani	4	2	0	-46.39	-10.1	-18.6	-9	-56.49	-27.6	28.88	2
3404110001	Wedomartani	4	2	2	-42.93	-4.69	-17.66	-22.23	-47.63	-39.88	7.74	2
3404110002	Umbulmartani	4	2	2	-52.78	31.53	18.93	-45.78	-21.25	-26.85	-5.6	4
3404110003	Widodo Martani	4	2	2	-43.09	10.4	-26.59	-17.72	-32.69	-44.31	-11.62	4
3404110004	Bimo Martani	4	2	2	-26.59	-28.98	-37.74	-9.2	-55.57	-46.93	8.64	2
3404110005	Sindumartani	4	2	2	-41.1	8.73	-57.86	4.28	-32.37	-53.58	-21.21	4
3404120001	Sari Harjo	4	2	0	1.52	21.86	25.66	16.26	23.37	41.91	18.54	1
3404120002	Sinduharjo	4	2	0	-11.85	-0.72	30.37	-18.14	-12.57	12.23	24.8	1
3404120003	Minomartani	4	2	0	-2.76	5.88	2.07	24.42	3.12	26.48	23.36	1
3404120004	Suko Harjo	4	2	2	-16.84	-10.48	-20.95	-13.57	-27.31	-34.52	-7.21	4
3404120005	Sardonoharjo	4	2	2	-7.16	8.05	3.92	-17.28	0.9	-13.35	-14.25	4
3404120006	Donoharjo	4	2	2	20.78	2.56	-48.02	-13.61	23.34	-61.63	-84.96	4
3404130001	Calur Harjo	4	2	2	-20.78	9.81	-4.33	-8.35	-10.98	-12.68	-1.71	4
3404130002	Triharjo	4	3	2	-9.59	51.66	62.59	-37.52	42.08	25.08	-17	3
3404130003	Tridadi	4	3	2	-21.14	23.59	35.93	-13.75	2.45	22.18	19.73	1
3404130004	Pandow Harjo	4	1	2	-28.86	-4.83	8.5	-26.4	-33.68	-17.9	15.79	2
3404130005	Tri Mulyo	4	2	2	-8.09	-19.43	-43.03	-2.75	-27.51	-45.79	-18.27	4
3404140001	Banyu Rejo	4	2	2	-19.79	-17.74	-6.82	-21	-37.53	-27.82	9.71	2
3404140002	Tambak Rejo	4	2	2	-34.12	-26.38	-75.61	2.67	-60.5	-72.94	-12.44	4
3404140003	Sumber Rejo	4	2	2	-19.66	-5.71	-41.96	-9.32	-25.37	-51.28	-25.91	4
3404140004	Pondok Rejo	4	2	2	-34.8	-22.59	-21.11	-15.13	-57.39	-36.24	21.15	2
3404140005	Moro Rejo	4	2	2	-28.42	-20.38	-52.65	-5.73	-48.8	-58.38	-9.58	4
3404140006	Margo Rejo	4	2	2	-33.16	9.3	16.67	-17.44	-23.86	-0.78	23.08	2
3404140007	Lumbung Rejo	4	2	2	-29.06	16.16	15.63	-27.62	-12.9	-11.99	0.91	2
3404140008	Merdiko Rejo	4	2	2	-35.43	-32.18	-32.03	-13.81	-67.61	-45.84	21.77	2
3404150001	Bangun Kerto	4	2	2	-28.69	-21.54	-31.68	-0.86	-50.22	-32.54	17.68	2
3404150002	Donokerto	4	2	2	-40.89	-0.65	-33.41	-2.54	-41.54	-35.95	5.59	2
3404150003	Giri Kerto	4	2	2	-37.63	-29.87	-57.57	-0.95	-67.5	-58.52	8.97	2
3404150004	Wono Kerto	4	2	2	-32.47	-20.47	-34.63	-9.22	-52.94	-43.85	9.09	2
3404160001	Purwo Binangun	4	2	2	-40.48	-14.12	-41.29	-14.31	-54.6	-55.6	-1	4
3404160002	Candi Binangun	4	2	2	-45.64	-3.18	-37.88	-17.65	-48.82	-55.52	-5.7	4
3404160003	Harjo Binangun	4	2	2	-27.6	-16.44	-55.3	-1.95	-44.04	-57.24	-13.2	4
3404160004	Pakem Binangun	4	2	2	-47.85	52.2	48.36	-43.84	4.35	4.51	0.16	1
3404160005	Hargo Binangun	4	2	2	-58.93	23.36	-13.22	-34.18	-35.57	-47.4	-11.83	4
3404170001	Wukir Sari	4	2	2	-32.17	-10.77	-49.09	-14.1	-42.94	-63.19	-20.25	4
3404170002	Argo Mulyo	4	2	2	-14.57	39.79	-5.06	-25.75	25.22	-30.81	-56.02	4
3404170003	Glagah Harjo	4	2	2	-32.04	-25.43	-50.76	-16.65	-57.48	-67.42	-9.94	4
3404170004	Kepuh Harjo	4	2	2	-37.77	-40.73	-57.58	-5.33	-78.5	-62.91	15.59	2
3404170005	Umbul Harjo	4	2	2	-44.7	-20.74	-60.43	1.46	-65.44	-58.97	6.47	2
3471010001	Gedongkiwo	5	3	0	65.93	-0.11	66.68	22.59	65.82	89.27	23.45	1

ID	Desa	K	B D	K L	Skor faktor 1 dan 2 Tahun 1990	Skor faktor 1 dan 2 tahun 2000	Total skor potensi wilayah	PRB POT WL	Tipo- logi			
3471010003	Mantrijeron	5	3	0	66.29	7.49	41.85	26.73	73.77	68.58	-5.2	3
3471020001	Palehan	5	3	0	95.8	-36.03	1.69	62.68	59.77	64.37	4.59	1
3471020002	Panembahan	5	3	0	96.87	-19.87	11.77	57.78	77.01	69.55	-7.45	3
3471020003	Kadipaten	5	3	0	102.19	-8.69	24.62	77.04	93.5	101.66	8.16	1
3471030001	Brontokusuman	5	3	0	53.12	32.44	72.01	18.98	85.56	91	5.44	1
3471030002	Keparakan	5	3	0	75.85	-0.34	28.41	49.29	75.5	77.7	2.2	1
3471030003	Wirogunan	5	3	0	78.69	11.8	48.94	43.19	90.48	92.13	1.65	1
3471040001	Giwangan	5	3	0	4.55	-8.57	22.88	-3.18	-4.02	19.71	23.72	1
3471040002	Sorosutan	5	3	0	39	14.22	38.02	16.18	53.22	54.2	0.98	1
3471040003	Pandeyan	5	3	0	38.15	16.56	62.65	0.14	54.71	62.79	8.08	1
3471040004	Warungboto	5	3	0	160.1	-121.78	-81.45	319.73	38.32	238.28	199.96	1
3471040005	Tahunan	5	3	0	42.65	-27.34	-9.33	26.03	15.3	16.7	1.4	1
3471040006	Muja Muju	5	3	0	12.99	42.32	70.31	-4.69	55.32	65.62	10.31	1
3471040007	Semaki	5	3	0	32.88	7.79	45.56	8.67	40.67	54.23	13.56	1
3471050001	Prenggan	5	3	0	30.61	32.07	59.37	-5.64	62.68	53.73	-8.95	3
3471050002	Purbayan	5	3	0	62.71	11.06	47.14	24.88	73.77	72.02	-1.75	3
3471050003	Rejowinangun	5	3	0	91.48	-46.37	-26.48	149.19	45.12	122.71	77.59	1
3471060001	Baciro	5	3	0	78	16.53	54.94	51.08	94.53	106.02	11.49	1
3471060002	Demangan	5	3	0	79.96	-5.77	44.28	42.6	74.2	86.88	12.68	1
3471060003	Klitren	5	3	0	99.49	13.32	70.09	37.16	112.81	107.26	-5.55	3
3471060004	Kotabaru	5	3	0	78.79	11.33	61.97	23.56	90.12	85.53	-4.59	3
3471060005	Terban	5	3	0	74.68	39.99	102.15	13.47	114.67	115.62	0.95	1
3471070001	Suryalmajan	5	3	0	91.51	-14.44	24.36	49.47	77.08	73.83	-3.25	3
3471070002	Tegal Panggung	5	3	0	123.73	-13.97	39.87	70.64	109.76	110.51	0.75	1
3471070003	Bausasran	5	3	0	99.48	-7.57	26.63	64.66	91.91	91.29	-0.62	3
3471080001	Purwo Kinanti	5	3	0	97.96	-18.16	20.51	59.02	79.8	79.53	-0.26	3
3471080002	Gunung Ketur	5	3	0	85.95	20.97	24.5	34.42	106.92	58.93	-48	3
3471090001	Prawirodirjan	5	3	0	89.16	37.35	36.2	44.12	126.51	80.32	-46.19	3
3471090002	Ngupasan	5	3	0	47.62	31.93	63.85	15.07	79.54	78.92	-0.62	3
3471100001	Notoprajan	5	3	0	91.99	20.2	79.54	20.74	112.19	100.28	-11.91	3
3471100002	Ngampilan	5	3	0	104.81	15.42	74.09	39.06	120.24	113.16	-7.08	3
3471110001	Patangpuluhan	5	3	0	89.75	-5.57	40.02	37	84.17	77.02	-7.15	3
3471110002	Wirobrajan	5	3	0	70.55	18.69	67.5	6.53	89.24	74.02	-15.21	3
3471110003	Pakuncen	5	3	0	63.49	13.22	40.92	32.69	76.71	73.61	-3.1	3
3471120001	Pinggokusuman	5	3	0	114.86	-1.63	36.9	62.84	113.23	99.74	-13.5	3
3471120002	Sosromenduran	5	3	0	86.16	20.03	62.3	34.17	106.19	96.48	-9.72	3
3471130001	Bumijo	5	3	0	91.22	47.6	55.09	33.5	138.82	88.59	-50.23	3
3471130002	Gowongan	5	3	0	85.89	1.34	36.69	55.41	87.23	92.1	4.87	1
3471130003	Cokrodiningratan	5	3	0	87.99	-9.58	32.17	51.87	78.4	84.04	5.63	1
3471140001	Tegalrejo	5	3	0	52.7	-16.18	48.11	17.62	36.52	65.73	29.21	1
3471140002	Bener	5	3	0	5.35	-31.16	19.37	18.88	-25.8	38.24	64.05	1
3471140003	Wadipati	5	3	0	64.18	-22.5	3.2	54.83	41.68	58.03	16.35	1

Keterangan :

ID = Identitas

K = Kabupaten (2 = Bantul, 4 = Sleman, 5 = Yogyakarta)

BD = Kawasan Budidaya (1 = Pertanian Lahan basah, 2 = Pertanian lahan Kering, 3 = Perkotaan, 4 = Perluasan Kota)

KL = Kawasan Lindung (0 = Tidak punya, 1 = Lindung Setempat, 2 = Lindung bawahan)

SF1-90 = Skor Faktor I Tahun 1990 (*demikian pula untuk tahun 2000*)SF2-90 = Skor Faktor I Tahun 1990(*demikian pula untuk tahun 2000*)SPOT-90 = Total Skor Faktor Tahun 1990 (*demikian pula untuk tahun 2000*)

PRB-POTWIL = Perubahan skor Potensi Wilayah dari tahun 1990 dan 2000

Jika positif, berarti meningkat, jika negatif berarti menurun.

Tipologi = Tipologi Potensi Perkembangan Wilayah (Hasil dari SPOT-2000 dan PRB-POTWIL.

(1= Potensi tinggi dan meningkat)

(2= Potensi rendah dan meningkat)

(3= Potensi Tinggi dan menurun)

(4=Potensi rendah dan menurun)

tinggi dan rendah ditentukan berdasarkan rata-rata. >rata-rata=tinggi dan sebaliknya.